

Analysis of The Level of Farmers Welfare in The Sekaroh Jaya Community Forest Sekaroh Village Jerowaru District East Lombok Regency

Akhmad Zarkasyi¹, Markum^{1*}, Febriana Tri Wulandari¹

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia;

Article History

Received: July 05th, 2025

Revised : July 15th, 2025

Accepted : July 22th, 2025

*Corresponding Author:

Markum, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram Nusa Tenggara Barat, Indonesia;

Email:

markum.exp@unram.ac.id

Abstract: The management of community forests plays a critical role in enhancing rural livelihoods. This study aims to analyze the income and welfare levels of farmers managing the Sekaroh Jaya Community Forest in Jerowaru District, East Lombok. A descriptive research approach was employed using both primary and secondary data collected through interviews and surveys of 65 randomly selected farmers. Data analysis included calculating net income, total costs, revenues, and comparing welfare status to World Bank poverty thresholds. The findings show that farmers earned an average net income of IDR 13,197,188/LLG/year from forest cultivation, with additional income from side jobs (IDR 1,535,000/year) and working family members (IDR 5,732,653/year), resulting in an average household income of IDR 20,464,841/year. While individual farmer welfare remains low, household-level welfare is categorized as high. These results indicate that household-level contributions significantly uplift overall farmer welfare. The study concludes that improving welfare strategies should not solely target individual income increases but also support household economic activities. These findings contribute to forest policy development and rural livelihood improvement strategies under community-based forest management programs.

Keywords: Community forest, farmer income, household economy, rural development, welfare.

Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan menjadi perhatian global dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam mengatasi kemiskinan dan menjaga kelestarian lingkungan. Di banyak negara berkembang, hutan tidak hanya menyediakan jasa ekologi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat sekitar hutan. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terluas, menghadapi tantangan dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan agar mampu mengelola dan memanfaatkan hutan secara bijak dan produktif. Dalam konteks ini, model pengelolaan berbasis masyarakat seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm) dipandang penting untuk mendorong keseimbangan antara fungsi konservasi dan ekonomi. Namun, implementasi

model ini seringkali menghadapi kendala seperti partisipasi masyarakat yang terbatas, distribusi manfaat yang tidak merata, serta kurangnya dukungan teknis dan pengakuan hak atas lahan. Keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengakuan hak tenurial, kapasitas kelembagaan lokal, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah (Hajjar *et al.*, 2020; Royer *et al.*, 2018; Friedman *et al.*, 2020; Komalawati *et al.*, 2023; Gilmour, 2016).

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat, seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), merupakan salah satu strategi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. Melalui program ini, masyarakat diberikan akses legal untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan, baik berupa kayu,

non-kayu, maupun jasa lingkungan, dengan tetap memperhatikan aspek konservasi. Implementasi HKm mendorong penerapan sistem agroforestri dan pengelolaan lahan berbasis konservasi, sehingga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian ekosistem hutan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa program perhutanan sosial, termasuk HKm, berkontribusi signifikan terhadap pendapatan rumah tangga petani, meskipun tingkat kesejahteraan yang dicapai masih bervariasi antar kelompok dan wilayah (Puspasari *et al.*, 2017). Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan penguatan kelembagaan petani menjadi faktor kunci dalam optimalisasi manfaat ekonomi dan ekologi dari pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Njurumana *et al.*, 2020; Sagita *et al.*, 2019; Zeilika *et al.*, 2021). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi HKm terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani sangat penting untuk menilai efektivitas program ini dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan (Ramadhan *et al.*, 2025; Herawati, 2018).

Walaupun program Hutan Kemasyarakatan (HKm) bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, pada kenyataannya tidak semua kawasan HKm mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Berbagai kendala seperti keterbatasan akses pasar, rendahnya kapasitas pengelolaan, minimnya pendampingan teknis, tingkat pendidikan yang rendah, serta kepemilikan lahan yang terbatas masih menjadi hambatan utama bagi petani dalam mengoptimalkan manfaat HKm. Akibatnya, banyak petani tetap berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah meskipun telah terlibat dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap pendapatan petani, baik dari hasil pengelolaan hutan maupun sumber pendapatan lain, serta analisis tingkat kesejahteraan berbasis indikator yang relevan sangat diperlukan.

Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa pada tahap awal implementasi atau di kawasan dengan keterbatasan akses dan dukungan, kontribusi pendapatan dari HKm atau agroforestri terhadap total pendapatan rumah

tangga petani masih relatif rendah, yaitu seringkali di bawah 15%–20% (Sabar *et al.*, 2025; Fadlika *et al.*, 2025; Andayani *et al.*, 2020; Makkarennu *et al.*, 2024). Banyak petani masih sangat bergantung pada sumber pendapatan lain di luar kawasan HKm, seperti pertanian non-hutan, buruh tani, atau usaha mandiri, karena hasil dari HKm belum optimal (Sabar *et al.*, 2025; Fadlika *et al.*, 2025; Makkarennu *et al.*, 2024).

Faktor-faktor seperti kecilnya penguasaan lahan, rendahnya literasi dan keterampilan teknis, serta kurangnya akses terhadap teknologi dan pasar menjadi penyebab utama rendahnya produktivitas dan pendapatan petani (Achmad *et al.*, 2022; Andayani *et al.*, 2020). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan intervensi pemerintah dan kolaborasi multipihak dalam bentuk pelatihan, pendampingan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan akses pasar dan teknologi agar manfaat ekonomi HKm dapat dirasakan lebih merata dan berkelanjutan (Achmad *et al.*, 2022; Putraditama *et al.*, 2021; Makkarennu *et al.*, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana peran HKm dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis total pendapatan petani baik dari kegiatan di kawasan HKm maupun dari sumber non-hutan, serta mengevaluasi tingkat kesejahteraan petani berdasarkan kategori individu dan rumah tangga. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi pemberdayaan petani hutan yang lebih efektif dan berbasis kebutuhan lokal.

Bahan dan Metode

Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada bulan September hingga Oktober 2024. Lokasi penelitian berada di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sekaroh Jaya, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini termasuk dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Timur.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi riil mengenai pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani berdasarkan data lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian deskriptif sesuai digunakan dalam kajian sosial ekonomi karena mampu menjelaskan fenomena yang sedang berlangsung (Sugiyono, 2019).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Sekaroh Jaya yang berjumlah 190 orang. Sampel diambil sebanyak 65 orang petani menggunakan teknik simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak tanpa mempertimbangkan strata tertentu agar semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih (Sugiyono, 2018). Variabel dalam penelitian ini meliputi: pendapatan petani dari kawasan hutan, pendapatan dari pekerjaan sampingan, pendapatan anggota keluarga, serta tingkat kesejahteraan individu dan rumah tangga petani. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner terstruktur. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain: kuesioner, alat tulis, kamera, serta dokumentasi sekunder dari instansi terkait.

Prosedur penelitian

Tahapan penelitian dimulai dari penentuan lokasi secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa lokasi merupakan kawasan HKm aktif yang memiliki anggota petani pengelola. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden menggunakan kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dari daftar nama petani aktif. Selain itu, dikumpulkan pula data sekunder dari KPHL Rinjani Timur dan instansi kehutanan lainnya. Setelah data terkumpul, dilakukan verifikasi dan pengolahan data di laboratorium sosial ekonomi kehutanan. Tahap akhir adalah analisis dan penyusunan laporan hasil penelitian.

Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif, yaitu pencarian dan penyusunan data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan

lapangan maupun bahan lain agar mudah dipahami maupun dikomunikasikan (Sugiyono, 2019).

Analisis Pendapatan

Tingkat pendapatan petani penelitian memakai rumus yaitu (Septiadi *et al.*, 2020):

1. Pendapatan Bersih

$$Pd = TR - TC$$

Keterangan:

Pd : Pendapatan Bersih (Rp)

TR : Total Penerimaan (Rp)

TC : Total Biaya (Rp)

Total Biaya

$$TC = FC + VC$$

Keterangan:

TC : Total Biaya (Rp)

FC : Biaya Tetap (Rp)

VC : Biaya Variabel (Rp)

Total Penerimaan

$$TR = Y \times Py$$

Keterangan:

TR : Total Penerimaan (Rp)

Y : Jumlah Produksi (Kg)

Py : Harga Jual Produksi (Rp/Kg)

Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan petani dianalisis berdasarkan kategori garis kemiskinan Bank Dunia (2023), yaitu lima tingkat kesejahteraan berdasarkan nilai pendapatan per kapita per hari dalam kurs rupiah. Data diolah menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2019 untuk menyusun tabel dan grafik serta melakukan perhitungan statistik deskriptif berupa rata-rata, persentase, dan kategori klasifikasi kesejahteraan.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik sosial-ekonomi responden

Karakteristik sosial-ekonomi responden berpengaruh langsung terhadap kemampuan petani dalam mengelola lahan dan merespon dinamika ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada dalam usia produktif (36–60 tahun) yaitu sebesar 80%, dengan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SD (49%) dan SMP (28%). Sebagian besar responden memiliki lahan seluas 1–2,5 hektar (66%) dan mengandalkan pekerjaan sampingan sebagai buruh tani (68%).

Tabel 1. Karakteristik Umum Responden

No	Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Umur	28-35 tahun	6	9%
		36-45 tahun	27	42%
		46-60 tahun	25	38%
		>60 tahun	7	11%
2	Pendidikan	Tidak bersekolah	3	5%
		SD	32	49%
		SMP	18	28%
		SMA	12	18%
3	Jumlah Anggota Keluarga	2 orang	9	14%
		3 orang	24	37%
		4 orang	21	32%
		≥ 5 orang	11	17%
4	Luas Lahan Garapan	1,0-2,5 ha	43	66%
		2,6-4,0 ha	17	26%
		> 4 ha	5	8%
5	Pekerjaan Sampingan	Tidak ada	1	2%
		Buruh tani	44	68%
		Peternak	10	15%
		Pedagang	5	8%
		Buruh bangunan	5	8%

Berdasarkan Tabel 1, sebagian besar responden berada dalam rentang usia produktif 36–60 tahun (80%), yang secara umum memiliki kapasitas kerja optimal dan tanggung jawab ekonomi tinggi terhadap rumah tangga. Usia ini juga mencerminkan kematangan dalam pengambilan keputusan tani, sebagaimana ditegaskan oleh Gusti *et al.* (2022) bahwa usia produktif berbanding lurus dengan efisiensi dan produktivitas petani. Sisi pendidikan, mayoritas responden hanya tamat SD (49%) dan SMP (28%), yang menunjukkan tingkat literasi formal masih rendah. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan petani dalam memahami informasi teknis dan mengakses program pemberdayaan. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan perlu disesuaikan dengan kapasitas dasar mereka melalui metode visual dan praktik langsung.

Jumlah anggota keluarga juga dominan pada kisaran 3–4 orang (69%), yang mencerminkan struktur rumah tangga inti. Ukuran keluarga ini dapat memengaruhi beban ekonomi sekaligus potensi kontribusi tenaga kerja keluarga terhadap usaha tani, terutama jika terdapat anggota keluarga yang turut bekerja sebagai buruh tani. Mayoritas petani memiliki lahan garapan seluas 1,0 – 2,5 hektar (66%), yang termasuk kategori lahan kecil-menengah. Luas lahan ini masih dapat menunjang produksi jika didukung oleh praktik pengelolaan yang efisien

dan pemilihan komoditas yang tepat. Namun, untuk meningkatkan pendapatan, petani perlu diberi akses pada teknologi produktif dan pasar yang lebih luas.

Sementara itu, sebagian besar petani (68%) memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh tani, yang menunjukkan bahwa hasil dari pengelolaan HKm belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Pekerjaan ini bersifat fleksibel dan menjadi sumber penghasilan tambahan utama di lingkungan pedesaan. Secara umum, karakteristik responden mencerminkan profil petani dengan potensi produktif yang cukup baik, namun masih menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan pendidikan, akses sumber daya, dan lahan yang relatif sempit. Hal ini menjadi dasar penting dalam merancang strategi pemberdayaan petani berbasis lokal yang lebih tepat sasaran.

Karakteristik ini mencerminkan bahwa petani berada pada posisi yang cukup kuat secara tenaga kerja, namun masih menghadapi keterbatasan akses informasi dan teknologi karena rendahnya pendidikan. Kondisi ini dapat menjadi kendala dalam pengambilan keputusan usaha tani yang efisien (Dewi *et al.*, 2018). Struktur keluarga yang sebagian besar terdiri dari 3–4 anggota (69%) juga menandakan potensi kontribusi tenaga kerja rumah tangga, yang dapat dioptimalkan untuk mendukung produksi

maupun usaha sampingan.

Biaya Produksi Responden

Biaya produksi merupakan seluruh pengeluaran yang ditanggung oleh petani dalam menjalankan usaha tani di lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Biaya ini terdiri atas biaya tetap, yang tidak dipengaruhi oleh volume

produksi, dan biaya tidak tetap (variabel), yang berubah seiring intensitas kegiatan tani. Pemahaman terhadap struktur biaya ini penting untuk menilai efisiensi usaha dan menentukan besaran pendapatan bersih petani. Rincian biaya produksi responden secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Biaya Produksi Responden (Rp/LLG/Tahun)

No	Komponen Biaya	Keterangan/Pembagian	Total Biaya (Rp)
A	Biaya Tetap		334.104
	1. Penyusutan Alat	Cangkul, sabit, parang, linggis, alat semprot	334.104
B	Biaya Tidak Tetap		15.753.923
	2. Tenaga Kerja	Penanaman, pemeliharaan, pemupukan, panen	5.124.923
	3. Mesin Penggiling Jagung	Biaya penggilingan 7.228 kg jagung Rp250/kg	1.806.923
	4. Bibit Jagung	48 kg Rp100.000/kg	4.818.462
	5. Pupuk	Urea, phonska, roundup	4.003.615
C	Total Biaya Produksi	A + B	16.088.027

Berdasarkan Tabel 2, total biaya produksi rata-rata per petani adalah sebesar Rp16.088.027 per tahun. Dari jumlah tersebut, biaya tidak tetap mendominasi pengeluaran, mencapai Rp15.753.923 (98%), sementara biaya tetap hanya sebesar Rp334.104 (2%).

Biaya Tetap

Komponen biaya tetap seluruhnya berasal dari penyusutan alat pertanian seperti cangkul, sabit, parang, linggis, dan alat semprot. Meskipun nilai satuannya kecil, akumulasi penyusutan dari alat-alat tersebut menghasilkan total biaya tetap yang cukup signifikan. Penyusutan ini penting diperhitungkan karena alat-alat tersebut memiliki masa pakai yang terbatas dan perlu diganti secara berkala. Menurut Mokalua *et al.* (2022), penyusutan aset pertanian adalah elemen penting dalam perhitungan keuntungan bersih dan kelayakan usaha tani.

Biaya Tidak Tetap

Biaya variabel terbagi atas empat komponen utama:

- Tenaga kerja: Merupakan pos terbesar dalam biaya variabel, mencapai Rp5.124.923/tahun. Biaya ini meliputi upah pekerja untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemupukan, dan panen. Kebutuhan tenaga kerja tinggi mencerminkan bahwa sebagian besar

aktivitas di lahan HKm masih dikerjakan secara manual, yang menunjukkan perlunya efisiensi kerja atau mekanisasi.

- Biaya penggilingan jagung: Dikeluarkan untuk memisahkan biji jagung dari tongkolnya menggunakan mesin. Dengan biaya rata-rata Rp250/kg untuk 7.228 kg jagung, total pengeluaran mencapai Rp1.806.923/tahun. Ini merupakan biaya penting dalam pascapanen dan memengaruhi kualitas hasil serta harga jual produk.
- Biaya pembelian bibit: Petani hanya membeli bibit jagung (Rp4.818.462), sedangkan bibit tanaman lain seperti sengon, kemiri, dan kayu putih merupakan bantuan dari pihak lain. Ini menunjukkan bahwa jagung merupakan komoditas utama yang dibudidayakan secara mandiri, sementara komoditas lain bersifat tambahan atau program pendukung.
- Biaya pupuk: Terdiri atas pupuk urea, phonska, dan roundup, dengan total biaya mencapai Rp4.003.615/tahun. Penggunaan pupuk ini menunjukkan adanya upaya petani untuk meningkatkan produktivitas, meskipun praktik pemupukan kemungkinan masih bersifat konvensional.

Implikasi

Struktur biaya yang didominasi oleh komponen variabel menunjukkan bahwa petani HKm masih sangat bergantung pada input

eksternal dan tenaga kerja manual. Kondisi ini menandakan perlunya intervensi peningkatan efisiensi, seperti pelatihan teknik budidaya hemat biaya, penguatan kelembagaan tani untuk pembelian bersama, serta akses terhadap alat pertanian sederhana yang hemat tenaga dan biaya.

Lebih lanjut, besarnya proporsi biaya tenaga kerja dan input produksi terhadap total pengeluaran memperlihatkan tingkat efisiensi yang masih rendah, yang dapat menekan margin keuntungan petani jika harga jual komoditas tidak stabil. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas harus dibarengi dengan pengendalian biaya produksi agar pendapatan bersih petani dapat lebih optimal.

Sumber Pendapatan Keluarga Petani

Pendapatan rumah tangga petani di

kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) tidak hanya bergantung pada hasil usaha tani dari lahan garapan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi lain. Dalam sistem pertanian subsisten atau semi-komersial seperti HKm, diversifikasi sumber pendapatan merupakan strategi adaptif yang umum dilakukan oleh petani untuk mengurangi risiko ekonomi, terutama ketika pendapatan dari lahan tidak stabil atau tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga (Susanti *et al.*, 2018; Shoimus Sholeh & Mublihatin, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan dari lahan HKm sebesar Rp13.197.188 per tahun, sedangkan pendapatan tambahan dari pekerjaan sampingan dan anggota keluarga masing-masing sebesar Rp1.535.000 dan Rp5.732.653 per tahun seperti ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sumber Pendapatan Keluarga Petani (Rp/LLG/Tahun)

No	Sumber Pendapatan	Rata-rata Pendapatan (Rp)
1	Pendapatan dari Lahan HKm	13.197.188
2	Pendapatan dari Pekerjaan Sampingan	1.535.000
3	Pendapatan Anggota Keluarga	5.732.653
4	Total Pendapatan Keluarga	20.464.841

Data pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa kontribusi pendapatan terbesar masih berasal dari hasil pertanian di lahan HKm (65% dari total), namun sekitar 35% sisanya berasal dari luar sektor tani, baik melalui pekerjaan tambahan maupun dukungan ekonomi dari anggota keluarga lain. Hal ini mengindikasikan bahwa petani HKm di Sekaroh Jaya belum dapat sepenuhnya mengandalkan hasil tani sebagai satu-satunya sumber nafkah. Pekerjaan sampingan seperti buruh tani, pedagang kecil, peternak, dan buruh bangunan masih menjadi pilihan utama untuk menambah pendapatan, sebagaimana juga ditemukan oleh Shoimus Sholeh dan Mublihatin (2021), bahwa pendapatan non-pertanian memberikan kontribusi signifikan dalam menstabilkan ekonomi rumah tangga petani, khususnya dalam konteks kawasan pinggiran yang rentan terhadap perubahan musim dan harga komoditas.

Keberadaan anggota keluarga yang turut bekerja, terutama sebagai buruh tani, menjadi komponen penting dalam struktur pendapatan rumah tangga. Hasil ini selaras dengan temuan Idris *et al.* (2023), yang menekankan bahwa

keterlibatan anggota rumah tangga secara aktif dalam sektor ekonomi lokal mampu mendorong ketahanan ekonomi dan meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga petani secara keseluruhan. Dengan demikian, strategi peningkatan kesejahteraan petani HKm tidak bisa hanya fokus pada peningkatan hasil tani, tetapi harus juga mempertimbangkan dukungan terhadap aktivitas ekonomi keluarga secara menyeluruh. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas kerja anggota keluarga, pemberdayaan ekonomi mikro, serta akses terhadap pekerjaan sampingan produktif yang berkelanjutan di sektor pedesaan.

Tingkat Kesejahteraan Petani: Individu dan Rumah Tangga

Analisis kesejahteraan dilakukan dengan mengacu pada standar pendapatan tahunan dari Bank Dunia (2023). Hasil menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan individu petani masih tergolong rendah, dengan 52% responden berada pada kategori “Rendah” dan 9% “Sangat Rendah”. Namun, jika dilihat dari sisi rumah tangga, mayoritas (54%) sudah berada pada

kategori “Tinggi” dan 38% pada kategori “Menengah”. Tingkat kesejahteraan petani: individu dan rumah tangga secara lengkap tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Kesejahteraan Petani: Individu dan Rumah Tangga

No	Kategori Kesejahteraan	Kisaran Pendapatan (Rp/Tahun)	Individu (%)	Rumah Tangga (%)
1	Sangat Rendah	≤ 5.840.000	9%	0%
2	Rendah	>5.840.000 – < 12.556.000	52%	3%
3	Menengah	≥ 12.556.000 – < 21.316.000	25%	38%
4	Tinggi	≥ 12.556.000 – < 21.316.000	12%	54%
5	Sangat Tinggi	≥ 40.004.000	2%	5%
	Total		100%	100%

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar petani secara individu (61%) berada dalam kategori kesejahteraan "rendah" hingga "sangat rendah", berdasarkan pendapatan bersih dari pengelolaan lahan HKm. Hal ini menunjukkan bahwa hasil usaha tani dari HKm belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan ekonomi petani secara individual, dan masih memerlukan dukungan sumber pendapatan lain. Namun, ketika dianalisis berdasarkan total pendapatan rumah tangga, terjadi pergeseran signifikan, di mana mayoritas responden berada pada kategori "tinggi" (54%) dan "menengah" (38%). Artinya, kontribusi pekerjaan sampingan dan anggota keluarga yang bekerja secara substansial meningkatkan tingkat kesejahteraan petani di level rumah tangga.

Temuan ini menguatkan studi dari Idris *et al.* (2023), yang menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan yang hanya berbasis pendapatan individu dapat menghasilkan bias pengukuran, terutama dalam komunitas agraris dengan kontribusi ekonomi kolektif yang tinggi. Oleh karena itu, pendekatan evaluasi berbasis rumah tangga lebih akurat dalam mencerminkan kondisi riil kesejahteraan petani. Selain itu, penelitian Dewi *et al.* (2018) dalam konteks HKm di Kulon Progo juga menemukan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh diversifikasi pendapatan dan partisipasi seluruh anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi, bukan semata dari hasil pertanian.

Perbedaan mencolok antara kesejahteraan individu dan rumah tangga dalam penelitian ini juga menandai bahwa penguatan ekonomi keluarga merupakan kunci keberlanjutan program HKm. Artinya, program peningkatan kesejahteraan tidak hanya diarahkan pada

produktivitas lahan, tetapi juga harus mendukung sektor informal rumah tangga melalui pelatihan keterampilan, akses usaha mikro, serta penyediaan lapangan kerja desa berbasis sumber daya lokal.

Pendapatan Petani dari Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Pendapatan utama petani berasal dari hasil pengelolaan lahan HKm, terutama budidaya jagung sebagai komoditas dominan. Rata-rata hasil produksi jagung sebesar 7,2 ton/LLG/tahun, dengan total penerimaan Rp28.910.769. Tanaman lain seperti sengon, kemiri, kayu putih, jambu mete, dan nangka memberikan kontribusi tambahan, namun dalam skala kecil.

Budidaya jagung menjadi pilihan utama karena memiliki siklus tanam yang singkat, teknik budidaya sederhana, dan pasar yang stabil. Keputusan petani untuk mengandalkan jagung juga dipengaruhi oleh pengalaman lokal dan dukungan agroekologis wilayah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Farizi (2015) yang menunjukkan bahwa petani cenderung memilih komoditas yang paling familiar dan cepat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Meskipun ada diversifikasi komoditas, sebagian besar hasil masih bertumpu pada satu jenis tanaman. Keberagaman tanaman lain lebih bersifat pelengkap dan belum sepenuhnya dikembangkan untuk mendongkrak pendapatan secara signifikan. Diversifikasi yang optimal dinilai dapat meningkatkan ketahanan ekonomi petani terhadap risiko gagal panen dan fluktuasi harga pasar (Wulandari *et al.*, 2024).

Struktur Biaya Produksi

Total biaya produksi petani mencapai Rp16.088.027/LLG/tahun, yang terdiri dari biaya tetap (Rp334.104) dan biaya tidak tetap (Rp15.753.923). Biaya tetap berasal dari penyusutan alat pertanian seperti cangkul dan alat semprot. Sementara itu, biaya tidak tetap mencakup biaya tenaga kerja, bibit jagung, pupuk, dan penggilangan hasil panen.

Komponen biaya terbesar berasal dari tenaga kerja (Rp5.124.923) dan bibit serta pupuk jagung (Rp8.822.077). Ketergantungan terhadap input eksternal menunjukkan bahwa sebagian besar petani masih menggunakan sistem budidaya konvensional yang padat modal dan padat kerja. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan efisiensi input dan pengembangan teknologi tepat guna (Mokalu *et al.*, 2022).

Total Pendapatan Keluarga Petani

Total pendapatan keluarga apabila dikombinasikan dengan sumber pendapatan lain, yaitu pekerjaan sampingan dan kontribusi anggota keluarga, total pendapatan rumah tangga petani mencapai Rp20.464.841 per tahun. Pendapatan dari pekerjaan sampingan (terutama sebagai buruh tani) menyumbang Rp1.535.000, sementara pendapatan dari anggota keluarga sebesar Rp5.732.653. Temuan ini sejalan dengan penelitian Shoimus Sholeh dan Mublihatin (2021) yang menyatakan bahwa pekerjaan sampingan memainkan peran penting dalam menopang ekonomi rumah tangga petani, terutama pada sektor informal seperti buruh tani dan peternak kecil. Kontribusi anggota keluarga yang bekerja juga meningkatkan kapasitas ekonomi kolektif rumah tangga, yang tidak tercermin jika hanya melihat pendapatan individu.

Tingkat Kesejahteraan Petani

Analisis kesejahteraan dilakukan dengan mengacu pada standar pendapatan tahunan dari Bank Dunia (2023). Hasil menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan individu petani masih tergolong rendah, dengan 52% responden berada pada kategori "Rendah" dan 9% "Sangat Rendah". Namun, jika dilihat dari sisi rumah tangga, mayoritas (54%) sudah berada pada kategori "Tinggi" dan 38% pada kategori "Menengah". Perbedaan ini menunjukkan bahwa peran keluarga sangat penting dalam

meningkatkan kesejahteraan, bukan hanya dari hasil pertanian saja. Pendekatan berbasis rumah tangga dalam evaluasi kesejahteraan menjadi lebih representatif, sebagaimana ditegaskan oleh Idris *et al.* (2023) bahwa indikator kesejahteraan harus mencakup seluruh kontribusi pendapatan dalam satu keluarga, bukan hanya kepala keluarga atau individu petani.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan HKm di Sekaroh Jaya memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan rumah tangga, meski belum menjadi sumber penghidupan yang mandiri. Mayoritas petani berada pada usia produktif dengan dukungan keluarga inti, namun masih terbatas dalam pendidikan dan luas lahan. Rata-rata pendapatan tahunan dari HKm sebesar Rp13.197.188, ditambah Rp1.535.000 dari pekerjaan sampingan dan Rp5.732.653 dari anggota keluarga, dengan total Rp20.464.841. Secara individu, sebagian besar petani tergolong sejahtera rendah, tetapi secara rumah tangga, mayoritas berada pada kategori menengah hingga tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya kontribusi kolektif keluarga, sehingga evaluasi program HKm perlu mencakup strategi ekonomi rumah tangga secara menyeluruh.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada kepada kedua orang tua dan dosen pembimbing Program Studi Kehutanan yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Referensi

- Bank Dunia. (2023). *World Bank Poverty and Inequality Platform*. <https://www.worldbank.org/poverty>.
- Dewi, A. S. P., Soetarto, E., & Susanto, D. (2018). Tingkat Kesejahteraan Petani Hutan di Kawasan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Penyuluhan*, 14(2), 149–163. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v14i2.24402>.
- Farizi, A. (2015). Strategi Petani dalam Menghadapi Fluktuasi Harga Komoditas:

- Studi Kasus pada Petani Jagung di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 3(3), 209–222. <https://doi.org/10.29244/jai.2015.3.3.209-222>.
- Friedman, R., Rhodes, J., Dean, A., Law, E., Santika, T., Budiharta, S., Hutabarat, J., Indrawan, T., Kusworo, A., Meijaard, E., John, F., Struebig, M., & Wilson, K. (2020). Analyzing procedural equity in government-led community-based forest management. *Ecology and Society*. <https://doi.org/10.5751/es-11710-250316>.
- Gilmour, D. (2016). *Forty years of community-based forestry: a review of its extent and effectiveness*.
- Gusti, S. P., Setiawan, B., & Wahyudi, E. (2022). Analisis Sosial Ekonomi Petani pada Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 19(2), 123–134. <https://doi.org/10.20886/jsek.2022.19.2.123-134>.
- Hajjar, R., Oldekop, J., Cronkleton, P., Newton, P., Russell, A., & Zhou, W. (2020). A global analysis of the social and environmental outcomes of community forests. *Nature Sustainability*, 4, 216 - 224. <https://doi.org/10.1038/s41893-020-00633-y>.
- Herawati, S. (2018). Role of Community Forestry in Farmers Welfare Improvement at District Ngarip Tanggamus., 7. <https://doi.org/10.25181/esai.v7i1.994>.
- Idris, M., Wulandari, C., & Rahman, M. T. (2023). Pendekatan Multidimensional dalam Pengukuran Kesejahteraan Petani Hutan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 30(1), 85–94. <https://doi.org/10.22146/jml.75093>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Statistik Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2021*. Jakarta: KLHK. <https://phl.menlhk.go.id>.
- Komalawati, K., Hidayat, S., Praptana, R., Pertiwi, M., Romdon, A., Hidayat, Y., Yuniati, D., Syahyuti, S., Ramadhan, R., Saptana, S., & Indrawanto, C. (2023). Community-Government, and Private Partnership (CGPP): Revisiting the Concept of Community-Based Forest Management. *International Forestry Review*, 25, 310 - 326. <https://doi.org/10.1505/146554823837586276>.
- Mokalu, F., Rante, H. L., & Tumiwa, J. (2022). Analisis Biaya dan Pendapatan Usaha Tani Jagung Hibrida di Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan. *Agri-Sosioekonomi: Jurnal Ilmiah Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 141–151. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.18.2.2022.42652>.
- Njurumana, G., Ginoga, K., & Octavia, D. (2020). Sustaining farmers livelihoods through community forestry in Sikka, East Nusa Tenggara, Indonesia. *Biodiversitas*, 21. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d210846>.
- Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan, A., & Banuwa, I. (2017). Aspek Sosial Ekonomi pada Sistem Agroforestri di Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Journal of Symbolic Logic*, 5, 95-103. <https://doi.org/10.23960/JSL3595-103>.
- Ramadhan, R., Afiq, M., Anggara, A., & Triwanto, J. (2025). Community welfare and forest sustainability in social forestry programs: a case study of kth bhakti alam lestari in malang, east java. *Indonesian Journal of Forestry Research*. <https://doi.org/10.59465/ijfr.2025.12.1.13-26>.
- Royer, S., Noordwijk, M., & Roshetko, J. (2018). Does Community-Based Forest Management in Indonesia Devolve Social Justice or Social Costs? *International Forestry Review*, 20, 167 - 180. <https://doi.org/10.1505/146554818823767609>.
- Sagita, M., Akhbar, A., & Muis, H. (2019). Partisipasi petani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di desa labuan toposo kecamatan labuan kabupaten donggala. , 7.
- Sholeh, S., & Mublihatin, N. (2021). Kontribusi Pendapatan Non-Pertanian terhadap Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Petani. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 22(1), 23–34. <https://doi.org/10.23917/jep.v22i1.13374>.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (ed. revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, D., Prabowo, R., & Sulistyowati, L. (2018). Diversifikasi Sumber Pendapatan Petani sebagai Strategi Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Rumah Tangga. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 6(1), 54–67. <https://doi.org/10.29244/jai.2018.6.1.54-67>.
- Wulandari, A., Ilsan, M., & Haris, A. (2024). Pengaruh karakteristik petani terhadap produksi padi sawah dan kelayakan usahatani di Desa Mappesangka. *Wiratani: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 7(2), 23–30. <http://jurnal.agribisnis.umi.ac.id/index.php/wiratani/article/view/119>.
- Wulandari, D., Rahayu, I. S., & Yuwono, S. (2024). Strategi Diversifikasi Usahatani dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Petani. *Jurnal Agriekonomika*, 13(1), 12–21. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v13i1.17541>
- Zeilika, E., Kaskoyo, H., & Wulandari, C. (2021). Pengaruh partisipasi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap kesejahteraan petani (studi kasus gapoktan mandiri lestari kph viii batu tegi). *Jurnal Hutan Tropis*. <https://doi.org/10.20527/jht.v9i2.11277>.